



UNIVERSITAS PAKUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI: BISNIS DIGITAL

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	NO&TGL DOK
Citizenship Education	UPK620623			5	
OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK		Ketua Prodi	
				Dion Achmad Armadi, S.E., M.Si	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK				
	CPL 2	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa dengan berdasarkan konstitusi serta menunjukkan sikap bertanggung jawab, jujur dan profesional atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, kejuangan, dan kewirausahaan			
	CPL 9	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, terukur dan bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya			
	CPL 15	Mampu mengembangkan pemikiran secara logis, kritis, kreatif dan inovatif dalam bekerja baik secara individu dan kelompok.			
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)				
	CPMK 1	Menunjukkan sikap bertanggung jawab sebagai warga Negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.			
CPMK 2	Mampu meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara.				

	CPMK 3	Mampu mendeskripsikan, menelusuri, menanya, menggali, membangun argumentasi esensi dan urgensi demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.				
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CMPK)					
	Sub-CPMK 1	Mahasiswa mampu menjelaskan definisi tentang Pendidikan Kewarganegaraan, Warga Negara dan Kewarganegaraan.				
	Sub-CPMK 2	Mahasiswa mampu mengidentifikasi diri dan identitas nasional.				
	Sub-CPMK 3	Mahasiswa mampu mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional`				
	Sub-CPMK 4	Mahasiswa mampu mendeskripsikan konstitusi dalam kehidupan berbangsa-negara.				
	Sub-CPMK 5	Mahasiswa mampu mengevaluasi diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban Negara dan Warga Negara untuk memperkuat jati dirinya.				
	Sub-CPMK 6	Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya pendidikan dan kebudayaan sebagai hak dan kewajiban warga Negara.				
	Sub-CPMK 7	Mahasiswa mampu menganalisis hakikat, instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia yang bersumber Pancasila dan UUD NRI 1945.				
	Sub-CPMK 8	Mahasiswa mampu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dan Negara Hukum, dan meyakinkan akan urgensi Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan Pendidikan Anti Korupsi.				
	Korelasi CPL terhadap CPMK					
		CPMK 1	CPMK 2	CPMK 3		
	CPL 2					
	CPL 9					
	CPL 15					
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini dipersiapkan pemerintah untuk menjadi salah satu sumber nilai dan bahan dalam penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai bangsa Indonesia seutuhnya. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) pada Perguruan Tinggi memiliki posisi strategis dalam melakukan transmisi pengetahuan dan informasi sikap serta perilaku mahasiswa Indonesia melalui proses pembelajaran. Dalam upaya meningkatkan mutu lulusan dan pembentukan karakter bangsa perlu dilakukan peningkatan dan perbaikan materi yang dinamis mengikuti perkembangan yang senantiasa dilakukan secara terus menerus, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan jaman, serta semangat belanegara. Pembelajaran yang diselenggarakan merupakan proses yang mendidik melalui proses berpikir kritis, analitis, induktif, deduktif, reflektif serta memicu “high order thinking” melalui dialog kreatif partisipatori untuk mencapai pemahaman tentang kebenaran substansi dasar kajian, berkarya nyata dan menumbuhkan motivasi belajar sepanjang hayat sejalan dengan konsep General Education .					

<p>Bahan Kajian/ Materi Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi tentang Citizenship Education (PKn) 2. Identitas nasional 3. Esensi dan urgensi integrasi nasional 4. Konstitusi dalam kehidupan berbangsa-negara 5. Hak dan kewajiban Negara 6. Pendidikan dan kebudayaan sebagai hak dan kewajiban warga negara 7. Hakikat, instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UUD NRI 1945 8. Menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dan Negara Hukum dan meyakinkan akan urgensi Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan Pendidikan Anti Korupsi
<p>Pustaka</p>	<p>Utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Chairul, Andi Gunawan Ratu. <i>Pendidikan Kewarganegaraan: Civil Educaation</i>. Jakarta: Celebes Media Perkasa, 2018 ● Harmaini, Muchtar Dahri dan Sarinah. <i>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN di Perguruan Tinggi)</i>. Jakarta: Deeppublish, 2017. ● Kaelan. <i>Pendidikan Kewarganegaraan</i>. Jogjakarta: Gajah Mada Press, 2016. ● Putra, Fauzi Eka dan Damri. <i>Pendidikan Kewarganegaraan</i>. Jakarta: Prenada Media, 2020. ● Rachman, Abdul dan Baso Madang. <i>Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi</i>. Jakarta: Celebes Medika Perkasa, 2017 ● Sunaryo, Hari. <i>Model Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Ancangan dan Best Practices</i>. Jakarta: Surya Pena Gemilang, 2018. ● Winarno. <i>Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi</i>. Jakarta: Bumi Aksara, 2019. ● Yuniarti, Desak Made. <i>Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi</i>. Jakarta: Literasi Nusantara, 2021. <p>Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● KPK. <i>Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi</i>. Jakarta: KPK, 2001. ● KPK. <i>Korupsi yang Terkait dengan Perbuatan Pemerasan</i>. Jakarta: KPK, 2001. ● KPK. <i>Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi</i>. Jakarta: KPK, 2001. ● KPK. <i>Pasal-Pasal Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001</i>.

	Jakarta: KPK, 2001.
Dosen Pengampu	Mutia Raras Respati, S.H., M.H.
Mata Kuliah Syarat	-

Minggu ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa (Estimasi Waktu)		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian %
		Indikator	Kriteria & bentuk	Luring	Daring		
1-2	Mahasiswa mampu menjelaskan definisi tentang Pendidikan Kewarganegaraan, Warga Negara dan Kewarganegaraan.	- Ketepatan menginterpretasikan Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yang baik.	Kriteria; Ketepatan & penguasaan Bentuk non tes; Pembuatan makalah	<ul style="list-style-type: none"> ● Kuliah dan Diskusi TM: 2x(2x50) ● Tugas; ● Menyusun ringkasan 	lms.unpak.ac.id	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi Pendidikan Kewarganegaraan ● Rumusan Pendidikan Kewarganegaraan. 	15
3	Mahasiswa mampu mengidentifikasi diri dan identitas nasional.	- Ketepatan menginterpretasikan untuk menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional secara etimologis.	Kriteria; Ketepatan & penguasaan Bentuk non tes; Pembuatan makalah	<ul style="list-style-type: none"> ● Kuliah dan Diskusi TM: 1x(2x50) ● Tugas; ● Menyusun ringkasan 	lms.unpak.ac.id	Kajian Identitas Nasional ditinjau secara: <ul style="list-style-type: none"> ● Historis ● Sosio kultural ● Politis 	5
4-5	Mahasiswa mampu mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional`	- Ketepatan menginterpretasikan jenis-jenis integrasi dan dimensi integrasi vertikal dan horizontal.	Kriteria; Ketepatan & penguasaan Bentuk non tes; Pembuatan makalah	<ul style="list-style-type: none"> ● Kuliah dan Diskusi TM: 2x(2x50) ● Tugas; ● Menyusun ringkasan 	lms.unpak.ac.id	Urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa	10
6-7	Mahasiswa mampu mendeskripsikan konstitusi dalam kehidupan berbangsa-negara.	- Ketepatan menginterpretasikan nilai dan norma yang terkandung dalam konstitusi di Indonesia dan istilah konstitusi.	Kriteria; Ketepatan & penguasaan Bentuk non tes; Pembuatan makalah	<ul style="list-style-type: none"> ● Kuliah dan Diskusi TM: 2x(2x50) ● Tugas; ● Menyusun ringkasan 	lms.unpak.ac.id	<ul style="list-style-type: none"> ● Mempelajari Bagaimana nilai dan norma konstitusional UUD NRI 1945 ● Konstitusionalitas ketentuan Perundang-Undangan di bawah UUD 	20

8							
Ujian Tengah Semester							
9-10	Mahasiswa mampu mengevaluasi diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban Negara dan Warga Negara untuk memperkuat jati dirinya.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menginterpretasikan hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. - Ketepatan menginterpretasikan konsep hak dan kewajiban. Sejatinya dalam setiap hak melekat kewajiban, setidaknya kewajiban menghormati hak orang lain. 	Kriteria; Ketepatan & penguasaan Bentuk non tes; Pembuatan makalah	<ul style="list-style-type: none"> ● Kuliah dan Diskusi TM: 2x(2x50) ● Tugas; Menyusun ringkasan 	lms.unpak.ac.id	Konsep dan Urgensi Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara.	15
11	Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya pendidikan dan kebudayaan sebagai hak dan kewajiban warga Negara.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menginterpretasikan perbedaan pendidikan dan kebudayaan serta perbedaan hak dan kewajiban warga negara. 	Kriteria; Ketepatan & penguasaan Bentuk non tes; Pembuatan makalah	<ul style="list-style-type: none"> ● Kuliah dan Diskusi TM: 1x(2x50) ● Tugas; Menyusun ringkasan 	lms.unpak.ac.id	<ul style="list-style-type: none"> ● Hak Pendidikan ● Kewajiban Pendidikan ● Peran pendidikan dalam pembangunan masyarakat ● Pentingnya kebudayaan dalam identitas bangsa ● Perlindungan dan pengembangan warisan budaya 	5
12-13	Mahasiswa mampu menganalisis hakikat, instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia yang bersumber Pancasila dan UUD NRI 1945.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menginterpretasikan Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Konstitusional. 	Kriteria; Ketepatan & penguasaan Bentuk non tes; Pembuatan makalah	<ul style="list-style-type: none"> ● Kuliah dan Diskusi TM: 2x(2x50) ● Tugas; Menyusun ringkasan 	lms.unpak.ac.id	<ul style="list-style-type: none"> ● Hakikat, Instrumentasi ● Praksis Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 	10
14-15	Mahasiswa mampu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dan Negara Hukum, dan meyakinkan akan urgensi	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menginterpretasikan tentang hukum, konsep Wawasan Nusantara, konsep Ketahanan Nasional dan Pendidikan 	Kriteria; Ketepatan & penguasaan Bentuk non tes; Pembuatan makalah	<ul style="list-style-type: none"> ● Kuliah dan Diskusi TM: 2x(2x50) ● Tugas; Menyusun ringkasan 	lms.unpak.ac.id	<ul style="list-style-type: none"> ● Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. ● Pendidikan sebagai investasi jangka 	20

	Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan Pendidikan Anti Korupsi.	Anti Korupsi.					<ul style="list-style-type: none"> ● Panjang ● Implikasi hukum dan regulasi ● Buku-buku dari KPK tentang Korupsi. 	
16	Ujian Akhir Semester							

Rencana, Distribusi, dan Persentase Penilaian MK*

Sub-CPMK	Tes Tulis	Tes Lisan	Presentasi	Keaktifan	Sikap	ETS	EAS	Persentase Penilaian
Sub-CPMK 1								
Sub-CPMK 2								
Sub-CPMK 3								
Sub-CPMK 4								
Sub-CPMK 5								
Sub-CPMK 6								
Sub-CPMK 7								
Sub-CPMK 8								
Persentase Penilaian								

Bogor, 2024
Dosen Pengampu,

.....

Keterangan *): Bentuk dan jenis penilaian dapat disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah